

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (Kedua). Kencana.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti
- Dan, P., Barak, A., & Manullang, E. F. M. (2018). *Penafsiran Teologis/Sosiologis, Penafsiran Suatu Refleksi Kritis*. 31(2), 262–285. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>
- Batubara, G. T., & Hulukati, T. S. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Setara Press.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (Buku I). PT Alumni.
- Lisanawati, G. (2013). Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Duapertiga Pada UU ITE dan Harmonisasinya atas RUU KUHP. In *Problematika Pembaharuan Hukum Nasional* (hal. 107–115). Komisi Hukum Nasional RI. <http://www.komisihukum.go.id>
- Mahrus, A. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Serikat Putra Jaya, N. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Siregar, A. (2019). *Regulasi Hukum Pornografi*. Scopindo.

B. Jurnal

- Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl, Volume VI* (Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia), 9–36.
- Arthani, N. L. G. Y. (2018). Eksploitasi Anak Dalam Penyebaran Pornografi Di Dunia Maya. *Jurnal Advokasi*, 101–112.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya

Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>

Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum*, 18(4).

Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>

Yudhistira, G. A., & Surgana, A. (2016). Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung. *Jurnal Verstek*, 4(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (1981)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 11 (2008).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 tahun 2016 1 (2016).
https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf

D. Sumber Lain

Jenkins, J. P. (2021). Pornography. In *Britannica* (hal. 1–4). Encyclopedia Britannica, Inc. <https://www.britannica.com/topic/pornography>

Maulana, R. (2021). *Kemenkominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet*. SindoNews.com.
<https://nasional.sindonews.com/read/617173/15/kemenkominfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-1638493945>